



BPS PROVINSI GORONTALO

**Laporan Keuangan
(Audited)**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017



Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No. 117

Telp. (0435) 834596, Fax. (0435) 834597

Homepage : <http://gorontalo.bps.go.id>, E-mail : bps7500@bps.go.id



BPS PROVINSI GORONTALO

**Laporan Keuangan
(Audited)**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017



Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No. 117

Telp. (0435) 834596, Fax. (0435) 834597

Homepage : <http://gorontalo.bps.go.id>, E-mail : bps7500@bps.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Gorontalo, 20 April 2018
Kepala,

Ir. Eko Marsoro, MM
NIP. 19660625 198802 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Neraca	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
F. Pengungkapan – pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran A1	
Lampiran SAIBA	
1. LRA Face	
2. LRA Belanja	
3. LRA Pengembalian Belanja	
4. LRA Pendapatan Negara dan Hibah	
5. LRA Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah	
6. Neraca Face	
7. Neraca SAIBA	

8. Neraca Percobaan
9. Laporan Operasional
10. Laporan Perubahan Ekuitas

LAMPIRAN SIMAK-BMN

1. CAL-BMN
2. CRBM
3. Laporan Posisi BMN di Neraca
4. Laporan Barang Persediaan dan BA Opname Phisik (Stock Opname) Barang Persediaan
5. Laporan Barang Kuasa Pengguna (Intra Komptabel) Periode 31 Desember 2017
6. Laporan Barang Kuasa Pengguna (Extra Komptabel) Periode 31 Desember 2017
7. Laporan Barang Kuasa Pengguna (Gabungan Intra/Extra Kompt) Periode 31 Desember 2017
8. Aset Tak Berwujud
9. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
10. Laporan Kondisi Barang
11. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (Intra)
12. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (Extra)
13. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (Gabungan)

LAMPIRAN-LAMPIRAN PENDUKUNG PENTING LAINNYA

1. Surat Persetujuan Pembukaan Rekening
2. Surat Pernyataan Rekening
3. Daftar Rekening
4. BA Rekonsiliasi SAIBA dari KPPN
5. BAR Internal antara SAIBA dan SIMAK-BMN
6. BA Rekonsiliasi SIMAK-BMN dengan KPKNL

LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMEN LAINNYA

1. Monitoring UP/TUP Tahun 2017
2. SSBP / SSPB Tahun Berjalan 2017
3. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Tahun 2017
4. Rekening Koran Tahun 2017
5. Memo Penyesuaian/ Kartu Taahun 2017
6. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual
7. Daftar Kerja Sama Tahun 2017
8. Telaah LK Tahun 2017

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perubahan Anggaran Berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja Tahun 2017	20
Tabel 2. Jumlah Pagu Anggaran Menurut Program dan Revisinya Tahun 2017	20
Tabel 3. Perbandingan Pagu Anggaran TA 2017 dan 2016	21
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2017 dan 2016	22
Tabel 5. Jumlah Pagu Anggaran Menurut PAGU dan Revisinya	23
Tabel 6. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	25
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Pendapatan	25
Tabel 8. Perbandingan Realisasi Belanja	26
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja	27
Tabel 10. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai	28
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Belanja Barang	28
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja Modal	29
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30
Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30
Tabel 15. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	31
Tabel 16. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	31
Tabel 17. Rincian Aset Tak Tanah	32
Tabel 18. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	35
Tabel 19. Rincian Aset Tak Berwujud	36
Tabel 20. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	37
Tabel 21. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	38
Tabel 22. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	39
Tabel 23. Rincian Beban Pegawai	39
Tabel 24. Rincian Beban Persediaan	40
Tabel 25. Rincian Beban Jasa	40
Tabel 26. Rincian Beban Pemeliharaan	41
Tabel 27. Rincian Beban Perjalanan Dinas	41
Tabel 28. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	42
Tabel 29. Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	43

Tabel 30. Rincian Koreksi Aset non Revaluasi	44
Tabel 31. Rincian Transaksi Antar Entitas	45
Tabel 32. Rincian Nilai Transfer Masuk	45
Tabel 33. Daftar Kerja Sama	46

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI GORONTALO

Jl. Prof. Dr. ALOEI SABOE No. 117 KOTA GORONTALO
TELEPON (0435)834596, FAXIMILE (0435)834597

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan (Audited) Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Gorontalo, 20 April 2018
Kepala BPS Provinsi Gorontalo,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo. The stamp contains the text "BADAN PUSAT STATISTIK" at the top and "PROVINSI GORONTALO" at the bottom, with a central logo. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Ir. Eko Marsoro, MM.
NIP. 19660625 198802 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan tahun 2017 (*Audited*) kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah PMK Nomor: 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada periode 31 Desember 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.398.998. atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara pada periode 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp12.196.729.719. atau mencapai 97,76 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp12.510.546.00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp27.287.037.750. yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp148.687.124. Aset Tetap (neto) sebesar Rp26.777.166.987 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp361.183.639.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp194.172.158. dan Rp27.092.865.592.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp5.843.950., sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp13.817.127.393. sehingga

terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(13.811.283.443). Kegiatan Non Operasional mengalami surplus sebesar Rp.6.762.298. sehingga entitas mengalami Surplus (Defisit) - LO sebesar Rp(13.806.072.345)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp18.993.056.055. dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(13.806.072.345). kemudian ditambah dengan Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan Akuntansi/Kesalahan mendasar senilai Rp9.426.014.516, kemudian ditambah dengan selisih Revaluasi Aset Tetap dan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi senilai Rp.313.072.034, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp12.479.867.366. kemudian ditambah dengan Kenaikan/Penurunan Ekuitas senilai Rp8.099.809.537. sehingga Ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp27.092.865.592.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI GORONTALO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DES 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-17		% thd Angg	31-Des-16
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	A.1	-	6.398.998	0,00	10.788.200
JUMLAH PENDAPATAN		-	6.398.998	0,00	10.788.200
BELANJA					
Belanja Pegawai	A.2	5.573.746.000	5.543.597.609	99,46	5.381.389.704
Belanja Barang	A.3	6.601.926.000	6.352.774.391	96,23	3.243.440.833
Belanja Modal	A.4	334.874.000	334.127.000	99,78	267.379.400
JUMLAH BELANJA		12.510.546.000	12.230.499.000	97,76	8.892.209.937

II. NERACA

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI GORONTALO NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-17	31-Des-2016
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	B.1	148.687.124	332.400
Jumlah Aset Lancar		148.687.124	332.400
ASET TETAP			
Tanah	B.2	4.861.957.000	510.389.050
Peralatan dan Mesin	B.3	13.207.526.380	12.725.410.760
Gedung dan Bangunan	B.4	18.878.875.000	14.869.074.051
Aset Tetap Lainnya	B.5	193.114.243	167.293.209
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	B.6	(10.364.305.636)	(9.662.259.748)
Jumlah Aset Tetap		26.777.166.987	18.609.907.322
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	B.7	1.329.855.052	1.350.315.052
Aset Lain-Lain	B.8	165.924.872	63.568.384
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	B.9	(1.134.596.285)	(840.475.440)
Jumlah Aset Lainnya		361.183.639	573.407.996
JUMLAH ASET		27.287.037.750	19.183.647.718
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	B.10	194.172.158	190.591.663
Uang Muka Dari KPPN	B.11	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		194.172.158	190.591.663
JUMLAH KEWAJIBAN		194.172.158	190.591.663
EKUITAS			
Ekuitas	B.12	27.092.865.592	18.993.056.055
JUMLAH EKUITAS		27.092.865.592	18.993.056.055
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		27.287.037.750	19.183.647.718

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI GORONTALO LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-17	31-Des-16
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	C.1	5.843.950	7.188.200
Jumlah Pendapatan Bukan Pajak		5.843.950	7.188.200
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		5.843.950	7.188.200
BEBAN			
Beban Pegawai	C.2	5.512.716.423	5.325.428.780
Beban Persediaan	C.3	480.981.150	595.994.069
Beban Barang dan Jasa	C.4	2.539.781.161	1.639.138.238
Beban Pemeliharaan	C.5	296.169.550	298.404.984
Beban Perjalanan Dinas	C.6	2.892.836.256	889.299.831
Beban Penyusutan dan Amortisasi	C.7	2.094.642.853	2.677.233.217
JUMLAH BEBAN		13.817.127.393	11.425.499.119
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(13.811.283.443)	(11.418.310.919)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(defisit) Dari Pelepasan Aset non Lancar	C.8	-	605.000
Pendapatan Pelepasan Aset non Lancar	C.9	-	3.600.000
Beban Pelepasan Aset non Lancar	C.10	-	2.995.000
Surplus/(defisit) Dari Kegiatan non Operasional Lainnya	C.11	5.211.098	2.908.150
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	C.12	6.762.298	3.196.275
Beban dari Kegiatan non Operasional Lainnya	C.13	1.551.200	288.125
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	C.14	5.211.098	3.513.150
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(13.735.960.837)	(11.414.797.769)
SURPLUS/DEFISIT LO		(13.806.072.345)	(11.414.797.769)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI GORONTALO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-17	31-Dec-16
EKUITAS AWAL	D.1	18,993,056,055	22,395,613,724
SURPLUS/DEFISIT LO	D.2	(13,806,072,345)	(11,414,979,769)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	D.3	9,426,014,516	(731,908,299)
SELISIH REVALUASI ASET	D.4	9,112,942,482	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	D.5	313,072,034	(731,908,299)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	D.6	12,479,867,366	8,744,148,399
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	D.7	8,099,809,537	(3,402,557,669)
EKUITAS AKHIR		27,092,865,592	18,993,056,055

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan

- Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;
 19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.05/2016 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN;
 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
 22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;

23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.6/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.6/2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
33. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga;
34. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

- 82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
35. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga; dan
36. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor.PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis BPS Provinsi Gorontalo

Rencana Strategis BPS Provinsi Gorontalo

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo didirikan sebagai lembaga penyelenggara statistik dasar di Provinsi Gorontalo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi dan tata kerja BPS Provinsi Gorontalo ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPS di daerah. BPS Provinsi Gorontalo berkedudukan di Jl. Prof. Dr.Aloei Saboe No.117, Wongkaditi, Kota Utara, Kota Gorontalo.

Dalam rangka menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019, Kementrian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementrian/Lembaga dengan menyusun visi dan misi Kementrian/Lembaga yang diselaraskan dengan visi dan misi RPJM 2015-2019. Dengan adanya renstra sebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan Kementrian/Lembaga maka pelaksanaan program dan kegiatan akan menjadi lebih terarah, efektif dan efisien.

Rencana Strategis disusun berlandaskan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Renstra BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 merupakan rencana pembangunan di bidang statistik di wilayah Provinsi Gorontalo selama lima tahun kedepan. Rencana strategis dirumuskan untuk menjadi pedoman dan rujukan bagi seluruh jajaran BPS Provinsi Gorontalo dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan statistik yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

berkomitmen dengan visi “ *Pelopor data statistik terpercaya untuk semua.*” Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo merumuskan misi yaitu sebagai berikut:

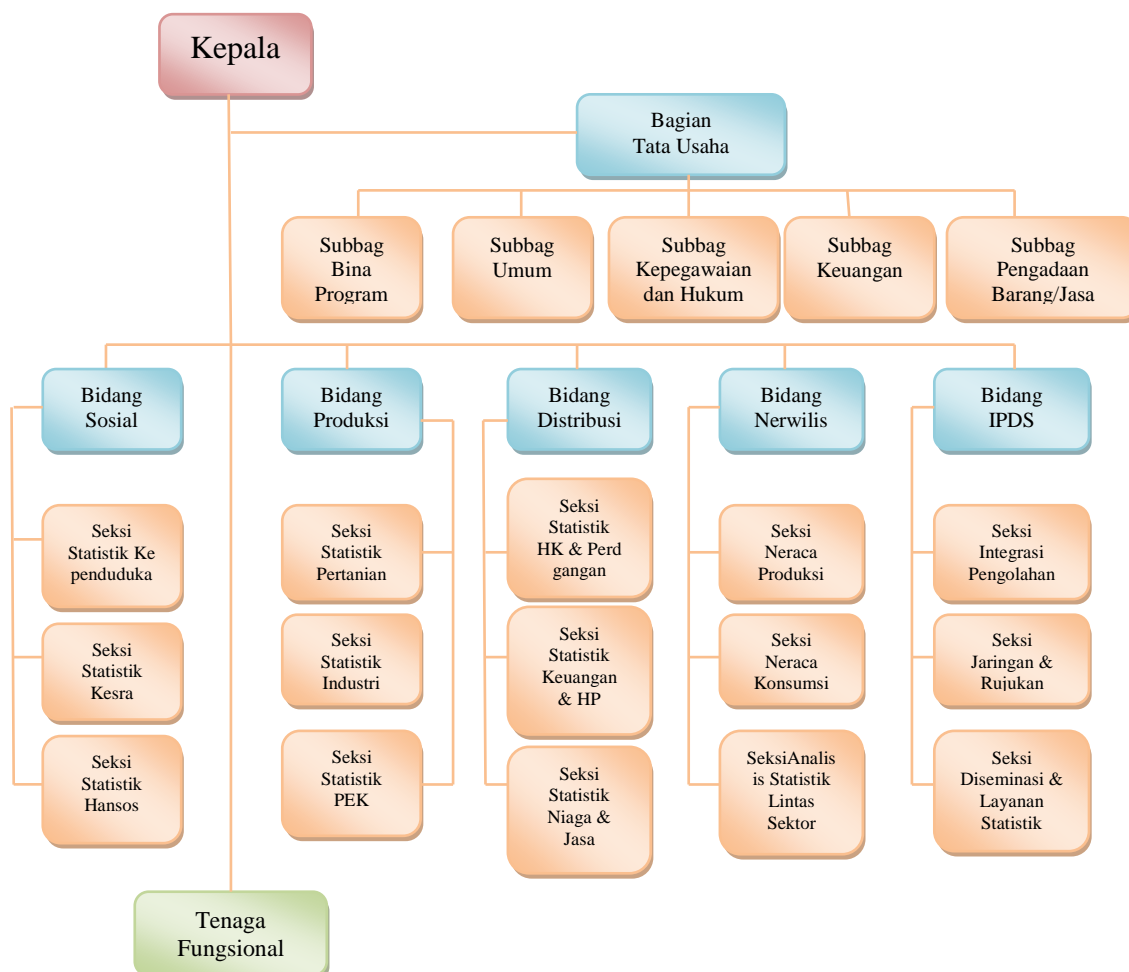
- Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.
- Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.
- Membangun insan statistik yang professional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan statistik.

Untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi, dirumuskan tujuan BPS Provinsi Gorontalo 2015-2019 yaitu:

- Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas.
- Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik.
- Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BPS Provinsi Gorontalo



*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan dan Hasil Cetakannya Lainnya diakui pada saat terjadi transaksi.
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi sesuai dengan tugas dan fungsi BPS diakui setelah kerjasama selesai dilaksanakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2017 tentang penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah dan PMK Nomor.118/PMK/06/2017 tentang pedoman penilaian kembali barang milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap Aset Tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta jalan, jaringan dan

irigasi berupa jalan, jembatan dan bangunan air pada kementerian Negara/lembaga sesuai kode fikasi barang milik Negara yang diperoleh sampai dengan peroid 31 desember 2015 termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada kementerian atau lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan atau pendekatan pendapatan oleh penilaian pemerintah dilingkup direktorat jenderal kekayaan Negara, kementerian keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1. Anggaran**

Anggaran TA 2017
Rp12.510.546.000.

Selama periode berjalan, Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perubahan Anggaran berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja per 31 Desember 2017

URAIAN	2017	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	5.573.746.000	5.573.746.000
Belanja Barang	7.720.225.000	6.601.926.000
Belanja Modal	126.699.000	334.874.000
Jumlah Belanja	13.420.670.000	12.510.546.000

B.1.1 Anggaran BPS Provinsi Gorontalo TA 2017 Menurut Sumber Dana

Kenaikan anggaran TA 2017 mencapai 26,48% disebabkan karena lima survei besar.

Sumber dana BPS Provinsi Gorontalo TA 2016 dan 2017 tidak memiliki anggaran yang dari hibah maupun PNBPN, seluruhnya berasal dari rupiah murni (RM), sedangkan sumber dana kerja sama yang dilaksanakan pada TA 2017 ini adalah kerjasama swakelola tipe II yaitu sebanyak dua kerjasama.

Tabel 2
Perbandingan Pagu Anggaran per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 menurut Sumber Dana

No	SUMBER	31-Des-17	31-Des-16	NAIK/TURUN (%)
1	Rupiah Murni (RM)	12.510.546.000	9.890.980.000	26,48
2	PNBP	-	-	-
3	Hibah	-	-	-
	Jumlah	12.510.546.000	9.890.980.000	26,48

B.1.2 Anggaran BPS Provinsi Gorontalo TA 2017 Menurut Jenis Program

Anggaran pada Program PPIS dan DMPTTL mengalami kenaikan sedangkan pada PPIS menurun

Anggaran Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo untuk Program DMPTTL pada TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 26.72 persen, hal ini disebabkan karena biaya operasional perkantoran (langganan daya dan jasa, pemeliharaan, dan operasional lainnya) mengalami peningkatan secara umum sehingga besaran anggaran belanja barang (52) ikut meningkat.

Anggaran belanja Program PSPA TA 2017 mengalami penurunan sebesar (55,39) persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam periode yang sama dikarenakan pada per 31 Desember 2016 terdapat belanja gedung dan bangunan berupa modal rehab rumah dinas sedangkan pada tahun 2017 belanja pada program PSPA hanya berupa pengadaan AC 6 unit, *exhaust fan* 18 unit, 1 buah media permanen baliho, lemari arsip 4 unit, wifi 1 paket dan pengadaan *mic wireles* 1 unit dengan nilai harga yang relatif kecil.

Anggaran belanja program PPIS pada TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 32,02 persen. Hal ini dikarenakan pada TA 2017 terdapat kegiatan besar berupa SE2016-Lanjutan, Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Pangan (SOUT, Survei Konsumsi dan Bahan Pokok (BAPOK) Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) dan Pelaksanaan Nilai Tukar Petani (NTP) 2017, besarnya kenaikan anggaran ini tidak lepas juga dari adanya penghematan anggaran program PPIS pada TA 2016 lalu, sedangkan untuk TA 2017 penghematan anggaran baru dilaksanakan pada semester II TA 2017.

Tabel 3
Perbandingan Pagu Anggaran per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 menurut Jenis Program

No	Program	31-Des-17	31-Des-16	NAIK/TURUN (%)
1	DMPTTL	7.159.738.000	5.650.039.000	26,72
2	PSPA	126.699.000	284.000.000	(55,39)
3	PPIS	5.224.109.000	3.956.941.000	32,02

B.1.3 Anggaran BPS Provinsi Gorontalo TA 2017 Menurut Jenis Belanja

Anggaran Belanja Modal terdapat pada Program PSPA dan PPIS

Anggaran Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo TA 2017 dan TA 2016 menurut belanja pegawai (51) turun sebesar (1.35) persen hal ini disebabkan mutasi pegawai yakni pindah tugas ke daerah lain.

Jika dilihat dari belanja barang (52), Anggaran BPS Provinsi Gorontalo pada TA 2017 dan TA 2016 naik sebesar 66,84 persen. Kenaikan ini disebabkan karena pada TA 2017 terdapat lima kegiatan besar yang semua kegiatannya berada pada program PPIS.

Pada jenis belanja modal (53), anggaran TA 2017 naik sebesar 17,91 persen dari anggaran TA 2016, Hal ini dikarenakan adanya belanja modal berupa pengadaan projector, laptop, tablet, personal computer dan perangkat scansnap beserta meja scansnap.

Pada per 31 Desember TA 2017 ini belanja modal (53) terdapat pada program PSPA dan program PPIS. Perbandingan Pagu Anggaran menurut jenis belanja tersebut tersaji di bawah ini.

Tabel 4
Perbandingan Pagu Anggaran per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
Menurut Jenis Belanja

NO	SUMBER	31-Des-17	31-Des-16	NAIK/TURUN (%)
1	Belanja Pegawai (51)	5.573.746.000	5.650.039.000	(1,35)
2	Belanja Barang (52)	6.601.926.000	3.956.941.000	66,84
3	Belanja Modal (53)	334.874.000	284.000.000	17,91
Jumlah		12.510.546.000	9.890.980.000	26,48

B.1.4 Revisi DIPA BPS Provinsi Gorontalo TA 2017

Revisi DIPA Dilakukan sebanyak 5 kali

BPS Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 mendapatkan anggaran belanja sebesar Rp.13.420.670.000 dengan melakukan revisi DIPA sebanyak 5 (lima) kali selama periode 31 Desember 2017. Revisi DIPA BPS Provinsi Gorontalo selama 31 Desember 2017 tersebut tersaji dalam tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5
Jumlah Pagu Anggaran per 31 Desember 2017 Menurut Program dan Revisinya

No	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH PAGU (Ribuan Rupiah)			
			DMP TTL	PSPA	PPIS	Jumlah
1	07 Desember 2016	DIPA Awal	7.159.738	126.699	6.134.233	13.420.670
2	05 April 2017	Revisi I	7.159.738	126.699	5.389.080	12.675.517
3	24 Mei 2017	Revisi II	7.159.738	126.699	5.382.681	12.669.118
4	16 Agustus 2017	Revisi III	7.159.738	126.699	5.224.109	12.510.546
5	12 Oktober 2017	Revisi IV	7.159.738	126.699	5.224.109	12.510.546
6	16 November 2017	Revisi V	7.159.738	126.699	5.224.109	12.510.546

Adapun revisi DIPA BPS Provinsi Gorontalo tersebut dilakukan karena:

1. Revisi I

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama BPS Nomor B-04/BPS/2000/02/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Revisi DIPA TA 2017 sesuai lampiran dasar hitung PPIS TA 2017. Pengurangan Pagu Anggaran PPIS disebabkan karena adanya perubahan kegiatan dari *Subject Matter* antara lain:

- Perubahan teknis pelaksanaan kegiatan di program PPIS sebanyak 12 survei/pendataan.
- Penambahan pelaksanaan kegiatan baru sebanyak 3 kegiatan.
- Penghentian dua kegiatan karena adanya duplikasi dengan kegiatan lain.

2. Revisi II

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama BPS Nomor B-0059A/BPS/2000/04/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Perubahan Rate SOUT TA 2017 sesuai lampiran semula menjadi Anggaran SOUT TA 2017 serta didasari oleh Surat dari Deputi MIS Nomor B-100/BPS/3000/04/2017 tanggal 21 April 2017 tentang Pengolahan Data Pencacahan SOUT2017. Pengurangan Pagu PPIS disebabkan karena adanya realokasi sampel dan perubahan rate pencacahan, *editing coding*, dan pemeriksaan.

3. Revisi III

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama BPS No. B-166/BPS/2000/07/2017 Tanggal 6 Juli 2017 perihal penegasan tindak lanjut penghematan anggaran tahun 2017, BPS Provinsi Gorontalo melaksanakan penghematan dari pos anggaran perjalanan dinas, paket meeting, belanja bahan dan belanja barang persediaan barang konsumsi.

4. Revisi IV

Revisi rencana penarikan triwulanan sebagai tindak lanjut terhadap revidu atas perencanaan kegiatan, penyerapan dan capaian kinerja dari KPPN dan Kanwil Provinsi Gorontalo.

5. Revisi V

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik No. B-295/BPS/3000/10/2017. Revisi juga dilaksanakan dalam hal terjadi kekurangan kebutuhan belanja pegawai BPS Provinsi Gorontalo.

Revisi anggaran sampai dengan 31 Desember 2017 tersebut hanya pada mengakibatkan perubahan pagu anggaran pada program PPIS saja yang seluruhnya bersumber dari rupiah murni (RM), tidak ada penambahan anggaran dari dana hibah maupun PNBPN. Pengurangan anggaran PPIS ini tidak mengurangi capaian kinerja karena revisi disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan dari *Subject Matter* dan sekaligus merupakan tindak lanjut surat sestama yang sudah disertai dasar hitungannya tanpa mengurangi jumlah output program PPIS.

B.2 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp6.398.998. Pendapatan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo terdiri dari :

1. Pendapatan dari penjualan buku publikasi BPS sebesar Rp1.320.000
2. Sewa tanah, gedung dan bangunan yakni sewa rumah dinas sebesar Rp4.523.950
3. Pendapatan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp555.048.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

*Realisasi
Pendapatan
Rp6.398.998*

Tabel 6
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2017

Uraian	TAHUN 2017		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan dari pengelolaan BMN	-	5,843,950	-
Pendapatan lain-lain	-	555,048	
Jumlah	-	6,398,998	-

Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan dan Pemanfaatan BMN per 31 Desember 2016 dan 2017 mengalami penurunan sebesar (17,82) persen dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan tidak adanya pendapatan pemindah tanganan BMN sampai dengan periode ini. Walaupun ada peningkatan pada pendapatan penjualan buku publikasi BPS, pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan serta adanya Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp555.048 di periode 31 Desember 2017. Sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN	REALISASI 31 DES 2017	REALISASI 31 DES 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan/Pemanfaatan BMN	5,843,950	4,186,100	39.60
Pendapatan Pemindahtanganan BMN	-	3,600,000	(100.00)
Pendapatan TAYL	555,048	-	100.00

B.3 Belanja

*Realisasi Belanja
sebesar 97.49% atau
senilai
Rp12.196.729.719.*

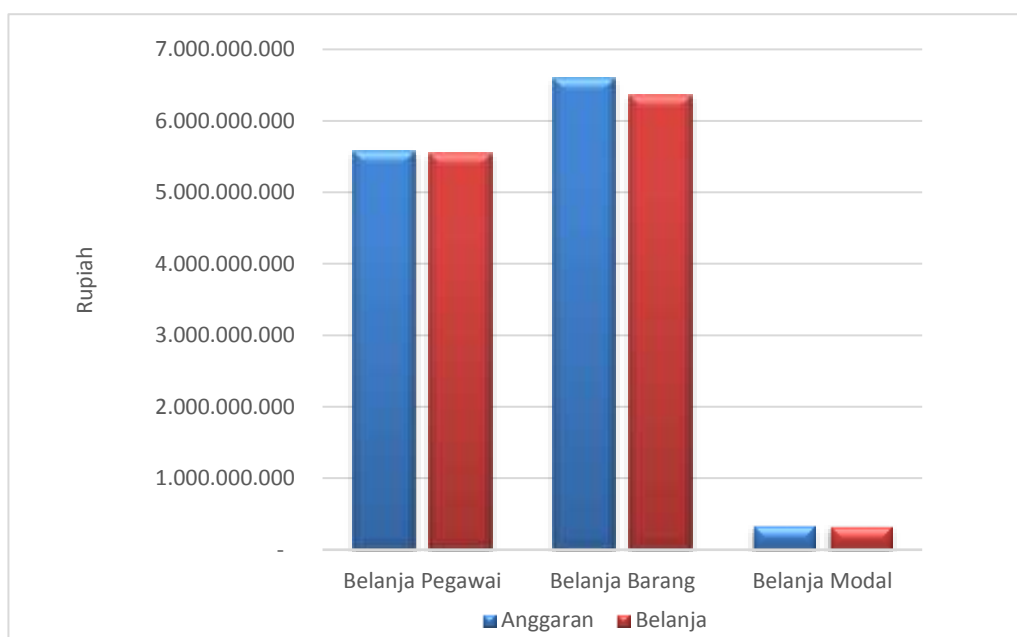
Realisasi Belanja Bruto Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp12.230.499.000 sedangkan pengembalian belanja sebesar Rp(33.769.281) sehingga realisasi netto sebesar Rp12.196.729.719 dari anggaran belanja sebesar Rp12.510.546.000 atau 97,49 persen yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM). Pengembalian belanja ini berasal dari pengembalian tunjangan kinerja dan perjalanan dinas paket meeting dalam kota.

Rincian Anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2017 menurut sumber dana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 8
Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017

Uraian	31-Des-17		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Angg.
Belanja Pegawai	5.573.746.000	5.543.597.609	99,46
Belanja Barang	6.601.926.000	6.352.774.391	96,23
Belanja Modal	334.874.000	334.127.000	99,78
Total Belanja Kotor	12.510.546.000	12.230.499.000	97,76
Pengembalian Belanja	-	(33.769.281)	
Total Belanja	12.510.546.000	12.196.729.719	97,49

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Gambar 2. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017

Realisasi Belanja per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 37.54% dibandingkan realisasi belanja per 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan karena sampai periode 31 Desember 2017 telah dilaksanakan kegiatan besar antara lain:

1. Pelatihan Survei Konsumsi Bahan Pokok (BAPOK) 2017.
2. Pelatihan Petugas Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Pangan (SOUT) TA 2017.
3. Pelaksanaan Rapat Teknis Daerah dan *Capacity Building* Koordinator Statistik Kecamatan.
4. Pelaksanaan Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) yang telah selesai seluruh rangkaian kegiatannya.

5. Pelatihan petugas pendataan Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2017
6. Pelatihan petugas Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2018

Perbandingan realisasi belanja TA 2017 dan 2016 dalam periode yang sama disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 menurut Jenis Belanja

URAIAN	31-Des-17	31-Des-16	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5.543.597.609	5.381.389.704	3,01
Belanja Barang	6.352.774.391	3.243.440.833	95,87
Belanja Modal	334.127.000	267.379.400	24,96
Jumlah	12.230.499.000	8.892.209.937	37,54

B.4 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp5.510.183.328 naik karena penambahan CPNS sebanyak 4 orang dan realisasi lembur pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.510.183.328 dan Rp5.314.350.307. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 3,68 persen dari 31 Desember 2016. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penambahan CPNS sebanyak 4 orang dan realisasi lembur pegawai.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN	REALISASI per 31 Desember 2017	REALISASI per 31 Desember 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.938.597.512	2.911.262.306	0,94
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	77.985.000	-	100,00
Belanja Pegawai (Tunj.Khusus Keg)	2.527.015.097	2.470.127.398	2,30
Jumlah Belanja Kotor	5.543.597.609	5.381.389.704	3,01
Pengembalian Belanja Pegawai	(33.414.281)	(67.039.397)	(50,16)
Jumlah Belanja	5.510.183.328	5.314.350.307	3,68

B.5 Belanja Barang

Belanja Barang naik 96.65% atau Rp6.352.419.391. disebabkan karena kegiatan pelatihan

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6.352.419.391 dan Rp3.230.243.833. Jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2016, realisasi belanja barang per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan 96.65% dari realisasi belanja barang per 31 Desember 2016. Kenaikan ini disebabkan adanya kegiatan berupa pelatihan petugas Survei BAPOK, SOUT, NTP, SBH, Rapat Teknis dan *Capacity Building* serta Pelaksanaan Kegiatan SPTK, sedangkan pada TA 2016 tidak ada kegiatan tersebut diatas dan adanya *self blocking* sehingga dilakukan penghematan anggaran.

Perbandingan belanja barang per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11
Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	667.115.866	611.954.099	9,01
Belanja Barang Non Operasional	1.654.158.076	678.205.195	143,90
Belanja Jasa	365.432.643	338.910.124	7,83
Belanja Pemeliharaan	436.662.550	457.994.484	(4,66)
Belanja Barang Persediaan	336.214.000	267.077.100	25,89
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.893.191.256	889.299.831	225,33
Jumlah Belanja Kotor	6.352.774.391	3.243.440.833	95,87
Pengembalian Belanja	(355.000)	(13.197.000)	(97,31)
Jumlah Belanja Bersih	6.352.419.391	3.230.243.833	96,65

B.6 Belanja Modal

Belanja Modal Rp334.127.000. turun 24.96% karena tahun ini tidak ada belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp334.127.000. dan Rp267.379.400. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi belanja modal per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 24,96 persen bila dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2016, Hal ini dikarenakan belanja peralatan dan mesin mengalami penambahan dibanding tahun 2016. Ini dapat terlihat pada rincian :

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Peralatan dan Mesin	334.127.000	43.029.400	676,51
Belanja Gedung dan Bangunan	0	224.350.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	334.127.000	267.379.400	24,96
Pengembalian	-	-	-

B.6.1. Belanja Modal Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp334.127.000 mengalami kenaikan sebesar 676,51 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp43.029.400. Belanja tersebut terdiri dari :

- Rak besi 4 buah senilai Rp7.977.000
- Papan Visual 1 buah senilai Rp27.300.000
- *Microphone/Wireless Mic* sebanyak 1 buah senilai Rp1.400.000.
- *LCD Projector/Infocus* sebanyak 4 buah senilai Rp64.690.000
- Meja kerja kayu 2 bu senilai Rp3.700.000
- A.C Sentral 1 buah senilai Rp23.250.000
- A.C Split 5 buah senilai Rp42.400.000
- *Exhause Fan* sebanyak 18 buah senilai Rp16.000.000
- Wifi Internet 1 buah senilai Rp7.800.000
- PC Unit sebanyak 3 unit senilai Rp53.617.500
- Laptop sebanyak 1 buah senilai Rp25.247.500
- *Tablet PC* sebanyak 2 buah 35.745.000
- *Scanner* sebanyak 2 buah senilai Rp25.000.000

Tabel 13

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	334.127.000	43.029.400	676,51
Jumlah Belanja Kotor	334.127.000	43.029.400	676,51
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	334.127.000	43.029.400	676,51

B.6.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pada TA 2017 BPS Provinsi Gorontalo tidak memiliki alokasi belanja modal Gedung dan Bangunan sehingga realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 praktis mengalami penurunan sebesar (100%) dibandingkan realisasi per 31 Desember 2016.

Tabel 14

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI per 31 Desember 2017	REALISASI per 31 Desember 2016	NAIK (TURUN) %
Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	20,700,000	-100.00
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	203,650,000	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	0	224,350,000	-100.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	224,350,000	-100.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Persediaan

Persediaan
Rp148.687.124

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp148.687.124 dan Rp332.400.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Persediaan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Barang Konsumsi	148.687.124	332.400
Bahan untuk pemeliharaan	-	-
Jumlah	148.687.124	332.400

Semua jenis persediaan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terlihat pada tabel diatas nilai persediaan mengalami kenaikan yang sangat tinggi dikarenakan adanya pencetakan kuesioner pada akhir tahun anggaran 2017 yang akan digunakan pada kegiatan tahun 2018. Ini menjadi rekomendasi tim BPK RI setelah melakukan audit di BPS RI.

C.3 Tanah

Tanah
Rp4.861.957.000.

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.861.957.000 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp510.389.050. Jika dilihat pada tabel dibawah ini, terjadi perubahan yang sangat signifikan pada nilai aset tetap tanah Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 dilakukan revaluasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah oleh KPKNL. Rincian Nilai tanah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut;

Tabel 16
Perbandingan Nilai Tanah Tahun 2017 dan 2016

Aset Tetap	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Tanah	4.861.957.000	510.389.050
Jumlah	4.861.957.000	510.389.050

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	510.389.050
Mutasi tambah:	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Asset	4.351.567.950
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Saldo per 31 Desember 2017	4.861.957.000

Tabel 17
Rincian Aset Tanah BPS Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2017

No.	KIB	Luas	Nilai	Keterangan
1	2	2.050 m	Rp 2.080.248.000	Bangunan rumah dinas Es.III
2	2	2.382 m	Rp 2.437.197.000	Bangunan kantor
3	3	392 m	Rp 344.512.000	Bangunan rumah dinas Es.II
Jumlah			Rp 4.861.957.000	

Semua aset tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

C.4 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp13.207.526.380.

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp13.207.526.380 dan Rp12.725.410.760. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	12.725.410.760
Mutasi tambah:	
Pembelian	334.127.000
Transfer Masuk	307.212.645
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	(77.327.537)
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(81.896.488)
Saldo per 31 Desember 2017	13.207.526.380
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(10.155.359.684)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	3.052.166.696

Mutasi tambah pada peralatan dan mesin terdiri dari:

1. **Pembelian** senilai Rp334.127.000. adalah berupa:

- Rak besi 4 buah senilai Rp7.977.000
- Papan Visual 1 buah senilai Rp27.300.000
- *Microphone/Wireless Mic* sebanyak 1 buah senilai Rp1.400.000.
- *LCD Projector/Infocus* sebanyak 4 buah senilai Rp64.690.000
- Meja kerja kayu 2 bu senilai Rp3.700.000
- A.C Sentral 1 buah senilai Rp23.250.000
- A.C Split 5 buah senilai Rp42.400.000
- *Exhause Fan* sebanyak 18 buah senilai Rp16.000.000
- Wifi Internet 1 buah senilai Rp7.800.000
- PC Unit sebanyak 3 unit senilai Rp53.617.500
- Laptop sebanyak 1 buah senilai Rp25.247.500
- *Tablet PC* sebanyak 2 buah 35.745.000
- *Scanner* sebanyak 2 buah senilai Rp25.000.000

2. **Transfer Masuk** senilai Rp307.212.645

- ✓ Sepeda motor sebanyak 1 unit dari BPS Kota Gorontalo senilai Rp17.676.000
- ✓ Alat pengukur kadar air sebanyak 3 buah dari BPS RI senilai Rp16.009.500
- ✓ Video monitor sebanyak 1 buah dari BPS RI senilai Rp120.171.430
- ✓ *End point vicon* sebanyak 1 unit dari BPS RI senilai Rp153.355.715

Mutasi kurang peralatan dan mesin terdiri dari:

1. **Tranfer keluar** senilai Rp(77.327.537). adalah berupa:

- ❖ Sepeda motor 1 unit ke BPS Kota Gorontalo senilai Rp(5.800.000)
- ❖ Stabilisator sebanyak 1 buah ke BPS Kab. Bone Bolango senilai Rp(58.700.000)
- ❖ PC sebanyak 1 unit ke BPS Kab. Pohuwato senilai Rp(12.827.537)

2. **Reklasifikasi** dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp81.896.488

- ❖ Sepeda motor sebanyak 1 unit senilai Rp5.800.000
- ❖ *White Board* 1 buah senilai Rp1.650.000
- ❖ Mesin Absensi 1 unit senilai Rp9.795.196
- ❖ AC Split 3 unit senilai Rp15.617.492
- ❖ Televisi 1 unit senilai Rp6.950.000

❖ *Plotter* (peralatan personal komputer) senilai Rp42.083.800

Rincian aset tetap peralatan dan mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.5 Gedung dan Bangunan

**Gedung dan
Bangunan
Rp18.878.875.000.**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp18.878.875.000 dan Rp14.869.074.051. Pada periode 31 Desember 2017 terjadi perubahan nilai Gedung dan Bangunan satker BPS Provinsi Gorontalo karena adanya revaluasi nilai aset BMN sebagaimana terinci di bawah ini:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	14.869.074.051
Mutasi tambah:	
Pengembangan Melalui KDP	-
Koreksi Revaluasi Nilai/Kuantitas	5.312.149.241
Mutasi kurang:	
Null	-
Saldo per 31 Desember 2017	20.181.223.292
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(1.302.348.292)
Saldo per 31 Desember 2017	18.878.875.000

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**Aset Tetap
Lainnya
Rp193.144.243.**

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp193.144.243 dan Rp167.293.209. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	167.293.209
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	25.821.034
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2017	193.114.243
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	-
Nilai Buku per 31 Desember 2017	193.114.243

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya adalah berupa Reklasifikasi masuk sebanyak 244 senilai Rp25.821.034. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.7 Akumulasi Penyusutan

**Akumulasi
Penyusutan
Rp(10.364.305.636)**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing Rp(10.364.305.636) dan Rp9.662.259.748. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 18

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	13.207.526.380	(10.155.359.684)	3.052.166.696
2	Gedung dan Bangunan	18.878.875.000	(208.945.952)	18.669.929.048
Akumulasi Penyusutan		32.086.401.380	(10.364.305.636)	21.722.095.744

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.8 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp1.329.855.052.

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp1.329.855.052. dan Rp1.350.315.052.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional perkantoran. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	1.350.315.052
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	(20.460.000)
Saldo per 31 Desember 2017	1.329.855.052
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(981.801.990)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	348.053.062

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 19

Rincian Aset Tak berwujud per 31 Desember 2017

Uraian	Nilai
Software	1.280.311.052
Lisensi	49.544.000
Jumlah	1.329.855.052

C.9 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp165.924.872.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp165.924.872 dan Rp63.568.384 . Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	63.568.384
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari aset tetap	102.356.488
Mutasi kurang:	
Penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2017	165.924.872
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2017	165.924.872

Transaksi mutasi tambah dan aset lain-lain sampai dengan periode 31 Desember 2017 meliputi reklasifikasi dari aset tetap berupa penghentian aset dari alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komputer unit, peralatan komputer sebesar Rp96.556.488 dan sepeda motor 1 unit senilai Rp5.800.000. Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

**Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp1.134.596.285.**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing Rp1.134.596.285. dan Rp840.475.440.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut

*Tabel 20
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2017*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Software komputer	1.280.311.052	132.334.295	1.147.976.757
Lisensi	49.544.000	969.415.990	(919.871.990)
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	145.464.872	12.386.000	133.078.872
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi	20.460.000	20.460.000	-
Jumlah	1.495.779.924	1.134.596.285	361.183.639

C.11. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp194.172.158.

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp194.172.158 dan Rp190.591.663. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian utang kepada pihak ketiga untuk periode 31 Desember 2017, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 21
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja pegawai yang belum dibayar	Rp 191,964,758
2	Langganan rekening air	Rp 2,207,400
Total		Rp 194,172,158

C.12 Ekuitas

Ekuitas Rp26.944.892.768.

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp26.944.892.768. dan Rp18.993.056.055.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

**Pendapatan
PNBP
Rp5.843.950**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5.843.950 dan Rp7.188.200 atau turun (18.70)% dari tahun lalu. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Tabel 22
Rincian Pendapatan PNPB periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

URAIAN	31-Des-17	31-Des-16	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survei, Pemetaan	1.320.000	1.590.000	(16,98)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	4.523.950	5.598.200	(19,19)
Jumlah	5.843.950	7.188.200	(18,70)

Pendapatan per 31 Desember 2017 tersebut berasal dari pendapatan sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan.

D.2 Beban Pegawai

**Beban Pegawai
Rp5.512.716.423**

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.512.716.423 dan Rp5.325.428.780. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 23
Rincian Beban Pegawai periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-17	31-Dec-16	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	2,108,170,510	2,039,337,705	3.38
Beban Pembulatan Gaji	34,780	29,141	19.35
Beban Tunjangan-Tunjangan	3,058,831,133	3,000,692,334	1.94
Beban Uang Makan	267,695,000	285,369,600	(6.19)
Beban Lembur	77,985,000	-	100.00
Jumlah	5,512,716,423	5,325,428,780	3.52

Beban gaji dan tunjangan periode 31 Desember 2017 naik sebesar 3.52 persen karena adanya penambahan CPNS sebanyak 4 orang dan realisasi lembur pegawai yang signifikan dibanding pada 31 Desember 2016.

D.3 Beban Persediaan

**Beban
Persediaan
Rp480.981.150**

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp480.981.150 dan Rp595.994.069. Beban Persediaan adalah beban untuk beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 24
Rincian Beban Persediaan periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-17	31-Des-16	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	480.981.150	595.994.069	(19,30)
Jumlah	480.981.150	595.994.069	(19,30)

D.4 Beban Barang dan Jasa

**Beban Barang
dan Jasa
Rp2.539.781.161**

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.539.781.161 dan Rp1.639.138.238. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian beban barang dan jasa untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Beban Jasa periode 31 Desember 2017 dan periode 31 Desember 2017

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-17	31-Des-16	NAIK (TURUN) %
Beban Langganan Daya dan Jasa	283.069.043	255.811.524	10,66
Beban Jasa Pos dan Giro	7.263.000	14.386.000	(49,51)
Beban Jasa Profesi	31.800.000	10.720.000	196,64
Beban Jasa Lainnya	46.746.000	71.530.000	(34,65)
Beban Sewa	5.000.000	25.860.000	(80,67)
Beban Barang Operasional	1.910.434.198	1.251.195.464	52,69
Beban Barang Non Operasional	255.468.920	9.635.250	96,23
Jumlah	2.539.781.161	1.639.138.238	54,95

Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar 54,93 persen karena

adanya kegiatan perkantoran yang memerlukan dana lebih, baik biaya operasional kegiatan maupun narasumber dari pihak luar untuk menambah pengetahuan pegawai dilingkungan instansi.

D.5 Beban Pemeliharaan

**Beban
Pemeliharaan
Rp296.169.550**

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp296.169.550 dan Rp298.404.984. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Beban Pemeliharaan periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-17	31-Des-16	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	57.414.800	72.679.650	(21,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	228.747.750	211.094.834	8,36
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	10.007.000	14.630.500	(31,60)
Jumlah	296.169.550	298.404.984	(0,75)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

**Beban
Perjalanan
Dinas
Rp2.892.836.256**

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.892.836.256 dan Rp889.299.831. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Beban Perjalanan Dinas periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-17	31-Dec-16	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	507,020,256	390,800,831	29.74
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	230,700,000	78,000,000	195.77
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,155,116,000	407,695,000	428.61
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	12,804,000	(100.00)
Jumlah	2,892,836,256	889,299,831	225.29

Beban perjalanan dinas pada periode 31 Desember 2017 mengalami peningkatan yang signifikan dibanding periode sebelumnya sebesar 225.29 persen karena kegiatan di tahun 2017 bertambah termasuk 5 survei besar yang memerlukan biaya lebih, baik itu pelatihan petugas, pelaksanaan pencacahan lapangan dan pengawasan lapangan.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

**Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp2.094.642.853**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.094.642.853 dan Rp2.667.233.217. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan beban amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-17	31-Des-16	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.515.972.409	2.219.300.941	(31,69)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	362.146.087	306.396.870	18,20
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	220.000	(100,00)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	213.097.212	149.608.262	42,44
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah	3.427.145	1.707.144	100,75
Jumlah	2.094.642.853	2.677.233.217	(21,76)

D.8 Kegiatan Non Operasional

**Surplus/Defisit
dari Kegiatan
Non
Operasional**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional
periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN	-	3.600.000	(100,00)
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	3.600.000	(100,00)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	2.995.000	(100,00)
Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	2.995.000	(100,00)
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-	605.000	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	555.048	-	100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	6.207.250	3.196.275	94,20
Jumlah Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6.762.298	3.196.275	111,57
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1.551.200	288.125	438,38
Jumlah Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.551.200	288.125	438,38
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.211.098	2.908.150	79,19
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.211.098	3.513.150	48,33
SURPLUS/DEFISIT - LO	13.954.045.169	(11.414.797.769)	(222,25)

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp18.993.056.055

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp18.993.056.055 dan Rp22.395.613.724. Selengkapnya terlampir pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp13.806.072.345

Jumlah Defisit Laporan Operasional; untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp13.806.072.345 dan Rp11.414.797.769. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Rp9.426.014.516

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp9.426.014.516 dan Rp731.908.299. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel 30
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2017

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Revaluasi Aset Tetap	9.112.942.482
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	313.072.034
Jumlah	9.426.014.516

Transaksi antar Entitas
Rp12.479.867.366

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp12.479.867.366 dan Rp8.744.148.399. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 31
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	12,196,729,719
Diterima Dari Entitas Lain	(6,398,998)
Transfer Masuk	289,536,645
Jumlah	12,479,867,366

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar Rp(6.398.998) sedangkan DKEL sebesar Rp12.196.729.719.

E.4.2 Transfer Masuk

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Pada periode hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp289.536.645 terdiri dari :

Tabel 32
Rincian Nilai Transfer Masuk per 31 Desember 2017

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Alat Pengukur Kadar Air (Moisture Tester)	BPS RI	16,009,500
Video Monitor	BPS RI	120,171,430
<i>End Point Vicon</i>	BPS RI	153,355,715
Jumlah		289,536,645

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp27.092.865.592

Nilai Ekuitas pada periode 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp27.092.865.592. dan Rp18.993.056.055. Jumlah per 31 Desember 2017 adalah selisih antara nilai Aset sebesar Rp27.287.037.750 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp194.172.158.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENJELASAN ATAS REKENING PEMERINTAH

Rekening
Pemerintah

Bank Pemerintah yang digunakan BPS Provinsi Gorontalo adalah Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Gorontalo dengan 2 (dua) buah rekening giro yaitu:

1. Rekening bendahara pengeluaran dengan nomor 0084288921 atas nama BPg 050 BPS Provinsi Gorontalo dengan saldo akhir di rekening per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0.
2. Rekening bendahara penerimaan dengan nomor 0297238194 atas nama BPn 050 BPS Provinsi Gorontalo yang digunakan untuk menampung dana penerimaan negara dengan saldo akhir di rekening per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0.

F.2 Pengungkapan Penting Lainnya

3 (Tiga)
Kerjasama
dengan Pihak
Lain

Pada tahun 2017 BPS Provinsi Gorontalo melakukan beberapa kerjasama dengan instansi lain yaitu sebagai berikut :

Tabel 33
Daftar Kerjasama dengan Instansi Lain

No	Instansi	Bentuk Kerjasama	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo	Swakelola	Rp 185.167.000	Rp 124.877.909	Penyusunan Analisis Tabel I-O Provinsi Gorontalo
2	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Univeversitas Negeri Gorontalo	MoU	Rp -	Rp -	Peningkatan Relevasi Mutu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3	Universitas Muhammadiyah Gorontalo	Mou	Rp -	Rp -	Bidang Statistik Dalam Pendidikan Pengajaran dan Penelitian serta Pengabdian Pada Masyarakat
Jumlah			Rp 185.167.000	Rp 124.877.909	

1. Kerjasama dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo berupa Penyusunan Analisis Tabel Input-Output (I-O) Provinsi Gorontalo Tahun 2017 dengan nomor 01/BAPPEDA-KP/I/2017 Tanggal 9 Januari 2017 selama 7 (tujuh) bulan sejak penandatanganan perjanjian. Realisasi belanja merupakan dana yang direalisasikan dan diterima oleh BPS Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 124.877.909 yakni Honor Narasumber, Pencetakan Dokumen dan Perjalanan Dinas.
2. Kerjasama dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo berupa Peningkatan Relevansi Mutu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan nomor 0961/UN47.B4/DT/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 selama 5 (lima) tahun sejak penandatanganan perjanjian. Tidak terdapat anggaran pada perjanjian ini karena berhubungan dengan peningkatan sumber daya melalui pengalaman kerja magang mahasiswa UNG di lingkungan BPS Provinsi Gorontalo serta membantu kelancaran dan membangun kemitraan antara BPS dengan Fakultas MIPA UNG.
3. Kerjasama dengan Universitas Negeri Muhammadiyah berupa Bidang Statistik dalam Pendidikan Pengajaran dan Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan nomor 16/II.3.AU/Mou-UMG/X/2017 Tanggal 26 Oktober 2017 selama 4 (empat) tahun sejak penandatanganan perjanjian. Tidak terdapat anggaran pada perjanjian ini karena berhubungan dengan pemberian informasi/data yang akurat oleh UMG ke BPS Provinsi Gorontalo serta peningkatan sumber daya melalui pengalaman kerja magang mahasiswa UMG di lingkungan BPS Provinsi Gorontalo.

F.3 Pengungkapan Lain-Lain

1. Pengelolaan Anggaran Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo diselenggarakan berdasarkan :
 - a. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik RI Nomor : 482/PA/2016 tanggal 2 Desember 2016 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran BPS Tahun Anggaran 2017 di Wilayah Provinsi Gorontalo;
 - b. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Gorontalo No.400/Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengelola Anggaran BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2017

*Pengungkapan
lain-lain*

Yang berisi tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran adalah:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Eko Marsoro
Pejabat Pembuat Komitmen	: Zainudin N. Taniyo
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Wiesye J. Damal
Bendahara	: Sity Defriani Djou

2. Tim BPK RI telah melakukan audit terhadap laporan keuangan 2017 satker BPS RI sehingga satker BPS Provinsi Gorontalo menyusun ulang laporan keuangan tahunan 2017 audited yang tersaji pada laporan keuangan ini.